

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA

Diah Ayu Kuswardani

NPP. 31.0493

Asdaf Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: diaha064@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Cut Laila Karmila, S.Sos, MA

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The rate of population growth and the variety of basic needs of the community will significantly increase the amount of waste, public awareness of waste management is still low and the available infrastructure is not sufficient for waste management. **Purpose:** This study was conducted to determine the implementation of waste management policies by the Yogyakarta City Environmental Service, supporting and inhibiting factors and efforts of the Yogyakarta City Environmental Service in overcoming obstacles to waste management in Yogyakarta City. **Methods:** The method used in the research is descriptive qualitative method with inductive approach. The technique of data collection is by conducting observations, documentation and interviews. **Result:** The implementation of waste management policies by the Yogyakarta City Environmental Agency has not been carried out optimally, characterized by indicators according to George Edward III, namely Communication, Data Sources, Disposition and Bureaucratic Structure that have not been maximized. **Conclusion:** The implementation of waste management policies by the Yogyakarta City Environmental Service has been running well internally. However, it is constrained by community support and the lack of facilities needed to manage waste in Yogyakarta City.

Keywords: Implementation, Policy, Management, Waste

ABSTRAK

Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Laju pertumbuhan penduduk dan beragamnya kebutuhan dasar masyarakat secara signifikan akan meningkatkan jumlah sampah, kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah dan sarana prasarana yang tersedia belum mencukupi terhadap pengelolaan sampah. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik dari pengambilan data yang dilakukan adalah dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara. **Hasil/Temuan:** Implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum terlaksana secara optimal ditandai dengan indikator menurut

George Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Data, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang belum maksimal. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta secara internal telah berjalan baik. Namun, terkendala pada dukungan masyarakat dan masih belum terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah

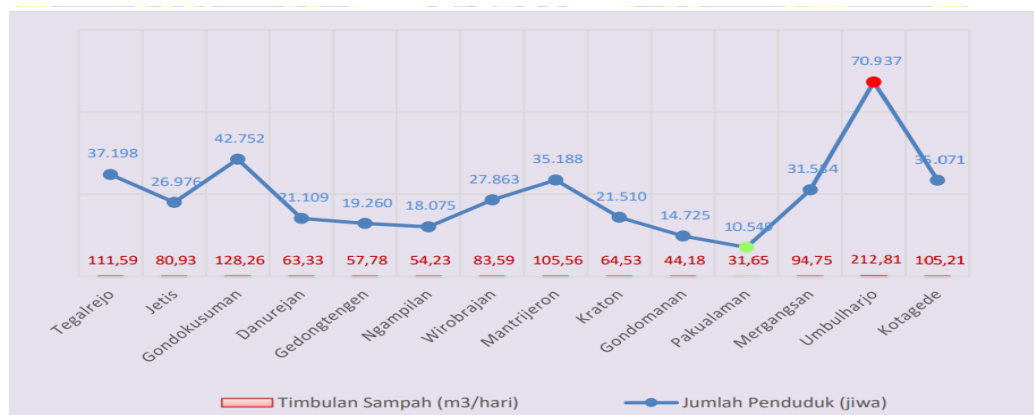
I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi sampah yang terus meningkat berbanding lurus dengan penambahan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, dan gaya hidup masyarakat (Kahfi, 2017). Berdasarkan Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diperoleh informasi bahwa dari 202 kabupaten/kota se-Indonesia terdapat timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya pemerintah membenahi permasalahan sampah di Indonesia (Deputi, 2015)

Dalam hal peran dan tanggung jawab penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membiayai melalui APBN dan APBD baik berupa biaya penanganan timbunan sampah maupun bentuk kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 12 ayat (2) terdapat Urusan Pemerintah Wajib yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan dasar salah satunya adalah lingkungan hidup. Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di wilayah masing-masing. Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Berdasarkan data bulan Desember 2020, Kota Yogyakarta merupakan kota penyumbang sampah terbesar di Provinsi DIY yaitu sebanyak 9.467 ton, disusul dari Kabupaten Sleman sebanyak 6.413 ton, dan Kabupaten Bantul sebanyak 2.977 ton (Hasanudin, 2020). Timbunan sampah yang dihasilkan rata-rata di Kota Yogyakarta sekitar 300 ton/hari. Semakin banyak jumlah penduduk menjadi salah satu faktor banyaknya jumlah timbunan sampah.

Gambar 1. 1
Grafik Perkiraan Jumlah Timbunan Sampah per Kemantren



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2022

Hal yang menjadi dasar permasalahan sampah di Kota Yogyakarta salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang diperuntukan untuk membuang sampah. Selain itu, ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan memunculkan masalah lain, yaitu terjadi penumpukan sampah di beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang melebihi batas volume.

Pemerintah Kota Yogyakarta membuat beberapa strategi-strategi penanganan sampah, salah satunya menyiapkan beberapa lokasi penanganan sampah. Ada 4 lokasi yang disiapkan untuk penanganan sampah sementara di antaranya Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS 3R) di Nitikan. Langkah berikutnya adalah adanya koordinasi dengan kemantren dan kelurahan untuk mengedukasi masyarakat tentang kemandirian pengelolaan sampah melalui pelatihan bank sampah (Adminwarta, 2023).

Tercatat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLH) Kota Yogyakarta persentase pengelolaan sampah oleh 575 bank sampah sebesar 0,47% atau sekitar 1.565,62 kg/hari. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah melalui program bank sampah, jumlah sampah yang masuk terbilang sedikit jika dibandingkan dengan sampah yang dihasilkan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Permasalahan paling mendasar dan menjadi salah satu masalah di Kota Yogyakarta ialah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai penghasil sampah untuk membuang sampah pada tempat yang telah diperuntukan untuk membuang sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentu menimbulkan permasalahan permasalahan lainnya dalam mengelola sampah yaitu kesulitan pengumpulan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Permasalahan yang kedua ialah karena pemerintah Kota Yogyakarta terbatasnya tempat pembuangan sementara dan terbatasnya lahan tempat pembuangan akhir.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna sebagai referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memiliki topik yang sama yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Mutiara Dian Prasasti yang berjudul Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Bondowoso (Prasasti, 2018) menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal dengan faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana.

Penelitian Inshan Padillah yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi (Padillah, 2019) menemukan hasil penelitian bahwa Pengelolaan sampah dinilai masih kurang optimal karena minimnya sarana atau prasarana yang tersedia kemudian juga dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Penelitian Mira Jayanti yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung (Jayanti, 2022) menemukan hasil pelaksanaan pada kebijakan yang telah dibuat belum berjalan secara optimal, yaitu sosialisasi dan mengedukasi masyarakat tidak berjalan secara konsisten

Penelitian Ratna Arisandi, Hery Nariyah, Nursahidin yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon (Ratna Arisandi dkk, 2019) hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Penelitian Tri Yudiarto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani yang berjudul Implementasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora (Tri Yudiarto dkk, 2021) menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah telah berjalan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

Penelitian Cecep Cahya Supena dan Erlan Suwarlan yang berjudul Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran (Cecep & Erlan 2020) menemukan hasil penelitian bahwa Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia dan anggarannya, bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah ialah dengan cara melakukan pengarahan dan memelihara fasilitas yang ada. Penelitian A Wachid dan D.L Caesar yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Kabupaten Kudus (Wachid & Caesar, 2020) menemukan hasil bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus juga terkendala dengan keterbatasan anggaran dan peralatan pengolah sampah.

Penelitian B. Hastuti, F. Anwar, dan T.Titi yang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Bengkulu Selatan (Hastuti dkk, 2021) menemukan hasil bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus juga terkendala dengan keterbatasan anggaran dan peralatan pengolah sampah. Pelaksanaan kebijakan yang telah diatur belum terealisasi dengan faktor penghambat kurangnya anggaran untuk sosialisasi, dan terbatasnya SDM yang ahli dalam bidang persampahan, dan aparat yang melakukan tugas diluar tupoksi. Penelitian Yulianto Mokodompis, Markus Kaunang, Ventje Kasenda berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado (Yulianto Mokodompis dkk, 2019) menemukan bahwa pengelolaan sampah di kota Manado sudah berjalan dengan baik, akan tetapi Masih mengalami kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dan keadaan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Penelitian Novia Kencana berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Kencana N, 2017) menemukan bahwa pengelolaan sampah sudah cukup berjalan dengan baik namun belum optimal dikarenakan masih ada beberapa hambatan yaitu partisipasi masyarakat yang kurang, perlengkapan sarana dan prasarana yang belum memadai, dan terbatasnya anggaran/dana.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan sampah secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendapat dari van meter van horn (Padillah, 2019), sedangkan penelitian ini menggunakan indikator dari Edward III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

II. METODE

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif dalam memperoleh dan menyajikan yang didapat dengan maksimal dan juga menyeluruh. Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang dapat digunakan terhadap sebuah penelitian dengan kondisi obyek yang alamiah, yang mana dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen dari kunci pengumpulan data yang didapatkan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih ditekankan pada makna dari pada generalisasi.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) (dalam Tangkilisan, 2016) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: (1) Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi; (2) Sumber Daya dengan indikator staf, informasi, kewenangan dan fasilitas; (3) Disposisi dengan indikator sikap, birokrasi dan insentif; (4) Struktur Birokrasi dengan indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menggunakan dimensi dari teori Edward III yang terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil pembahasan melalui penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA.

3.1 Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses dari perpindahan informasi dari satu hal lain dengan hal lainnya. Komunikasi memiliki indikator untuk keberhasilan suatu kebijakan yang sudah ditetapkan, yaitu:

3.1.1 Transmisi

Transmisi dapat menjadi acuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan melihat dari bentuk kegiatan, bagaimana cara penyampaian kegiatan, dan media yang digunakan dalam menyampaikan kebijakan pengelolaan sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta melakukan rapat koordinasi untuk melihat pencapaian yang telah dilakukan di bidang persampahan, apakah kinerja sudah sesuai dengan strategi, program dan target yang ingin dicapai, kemudian menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dengan media elektronik yaitu video agar mudah diakses dan dipahami dari berbagai kalangan.

3.1.2 Kejelasan

Kurangnya kejelasan dalam mengkomunikasikan kebijakan pengelolaan sampah secara jelas berakibat pada implementasi yang tidak tepat sasaran. Kejelasan informasi diukur dari seberapa mudah informasi dipahami dan diaplikasikan. Hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami kebijakan pengelolaan sampah dan belum mampu melaksanakannya secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan masih belum efektif.

3.1.3 Konsistensi

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mewujudkan konsistensi komunikasi kebijakan pengelolaan sampah terlihat dari komunikasi yang berkelanjutan dan terarah pada tujuan kebijakan. Pemasangan spanduk larangan membuang sampah sembarangan dan di TPS liar merupakan contoh komunikasi berkelanjutan. Namun, belum adanya teguran tegas menunjukkan bahwa konsistensi komunikasi masih belum optimal.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya sangat penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah untuk memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan efektif dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Sumber daya bisa berupa berbagai hal, yaitu:

3.2.1 Staf

Staf merupakan sumberdaya manusia yang ada di Dinas Lingkungan Hidup kota Yogyakarta yang memiliki kemampuan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta.

Dari hasil wawancara peneliti bahwa, jumlah staf yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terutama bidang persampahan masih tergolong kurang. Akan tetapi, sejauh ini dapat dimaksimalkan dengan jumlah yang ada dengan harapan dapat ditambah sesuai kebutuhan tenaga kerja pengelolaan sampah.

3.2.2 Informasi

Penyebaran informasi yang efektif merupakan indikator penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan. Informasi yang jelas mengarahkan tindakan yang perlu diambil dalam suatu kebijakan. Keberhasilan informasi diukur dari perubahan perilaku pelaksana kebijakan. Berdasarkan penelitian melalui wawancara, terungkap bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah menyampaikan informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah secara internal kepada staf dan tenaga kerja di bidang persampahan. Bagian pusat daur ulang juga telah menerapkan metode *composting*. Hal ini menunjukkan efektivitas penyampaian informasi yang berdampak pada pengelolaan sampah sesuai dengan kebijakan, yaitu pemanfaatan sampah.

3.2.3 Kewenangan

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat. Hal ini membantu memastikan bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan teratur, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan serta prioritas lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

3.2.4 Fasilitas

Sarana dan prasarana merupakan infrastruktur yang penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta guna memastikan keberhasilan implementasinya.

Tabel 1. 1
Fasilitas Sarana dan Prasarana

Fasilitas	Jumlah (unit)
Gerobak Sampah	40
Kendaraan roda 3 sampah	36
Bin Compactor	108
Dump Truck	40
Container Sampah	7
Landasan Container	4
Transfer Depo	14
TPS Permanen	24
TPA	1
Road sweeper	2
Mesin pencacah organic	4
Mesin pencacah kertas	2
Mesin cacah pilah otomatis (Gibrik)	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, 2023

Dari data di atas untuk sarana sudah cukup memadai akan tetapi dengan jumlah prasarana TPA yang hanya memiliki satu menjadi hambatan dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dan masih belum terlaksana secara maksimal.

3.3 Disposisi

Keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dinilai dari tanggapan dan disposisi para pelaku kebijakan dan masyarakat. Beberapa faktor kunci yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta:

3.3.1 Sikap Pelaksana

Komitmen pelaksana kebijakan tercermin dari respons dan dukungan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah menunjukkan komitmen maksimal dalam aspek pengumpulan dan pengangkutan sampah. Namun, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terbukti dengan masih ditemukannya sampah di luar TPS dan dibuang di luar jam yang ditentukan.

3.3.2 Pengangkatan Birokrasi

Proses pengangkatan birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan secara profesional, dengan memilih individu yang kompeten dan terpercaya untuk menjadi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas aparatur berasal dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Yogyakarta,

dan penempatan jabatannya didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan sesuai aturan ASN.

3.3.3 Insentif

Insentif menjadi faktor penting dalam memaksimalkan efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan. Insentif ini berfungsi sebagai motivator atau pendorong bagi pelaksana kebijakan untuk menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Bentuk insentif dapat berupa dana insentif yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta atau penghargaan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kepada pegawai atau masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.

3.4 Struktur Birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh struktur birokrasi yang ideal yang dapat diuraikan atas Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi yang jelas dan terstruktur.

3.4.1 Standar Operasional Prosedur

Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi waktu dan menyelaraskan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil observasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah mengikuti SOP yang telah ditetapkan untuk meminimalisir kesalahan dan tumpang tindih tanggung jawab.

3.4.2 Fragmentasi

Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dengan struktur organisasinya menjalankan fragmentasi pekerjaan dalam pengelolaan sampah secara proporsional sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka. Pembagian kerja ini didukung dengan adanya struktur organisasi yang dilandaskan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan pemahaman tentang fragmentasi kepada para pegawai dengan memasang struktur organisasi di tempat yang mudah terlihat oleh para pegawainya sehingga diharapkan dapat membantu para pegawai untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik.

3.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Mempunyai Petunjuk Teknis Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Petunjuk teknis berfungsi sebagai dokumen yang memuat langkah-langkah teknis yang harus dilakukan di lapangan dalam rangka menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. Teknis pengelolaan sampah yang dilakukan, yaitu:

- a. Pengumpulan sampah dari Tempat Pengurangan Sampah
- b. Pemisahan sampah berdasarkan sampah organik, anorganik, dan sampah B3
- c. Pengolahan sampah di Pusat Daur Ulang (PDU)

- d. Pengangkutan sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir(TPA)
- e. Mendaur ulang sampah menjadi produk baru
- f. Pengolahan sampah daur ulang menjadi barang baru hingga bahan baku

2. Memiliki Staf yang Ahli Dibidangnya

Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah tak terlepas dari keberadaan staf yang kompeten dalam bidangnya. Pegawai yang ada di sana memiliki keahlian yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan sebelumnya. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tidak mengalami kesulitan teknis dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah.

3. Struktur Organisasi yang dapat mendukung penempatan pejabat-pejabat birokrat yang mumpuni dalam hal intelektual dan manajerial, sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Struktur organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memungkinkan pelaksanaan aktivitas pengelolaan sampah secara efisien, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai, sehingga terhindar dari tumpang tindih tanggung jawab. Struktur organisasi di Yogyakarta terbukti mempermudah kegiatan pengelolaan sampah dikarenakan terakomodirnya kelompok tenaga kerja persampahan yang bertugas di lapangan yang bertanggung jawab tanggung di lapangan. selanjutnya, adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tepat sasaran.

3.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1. Masih Kurangnya Kesadaran dan Dukungan Masyarakat Mengenai Kebijakan Pengelolaan Sampah

Masyarakat masih belum menunjukkan kepedulian yang memadai, seperti ketidaktahuan tentang pengelolaan sampah, pelanggaran jam pembuangan sampah, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Hal ini akan menghambat jalannya pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

2. Kurangnya Dana Pengelolaan Sampah

Dana dalam pengelolaan sampah Kota Yogyakarta cukup terbilang besar. Namun, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan fasilitas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran, sehingga berakibat pada terhambatnya pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah.

3. Kurangnya Jumlah Tenaga Kerja Lapangan Persampahan

Jumlah tenaga kerja yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta masih tergolong kurang dibandingkan kebutuhan SDM pelaksana pengelolaan sampah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, setidaknya petugas sampah perlu ditambah. Dari 275 orang yang bekerja sebagai petugas sampah dengan dibandingkan

jumlah penduduk Kota Yogyakarta sebanyak 449.890 jiwa tentunya tidak sebanding dengan petugas sampah yang ada. Kurangnya tenaga persampahan di Kota Yogyakarta menghambat kelancaran pelaksanaan.

4. Terbatasnya Lahan TPA

Hambatan yang ditemui yaitu penggunaan lahan yang menjadi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang sebelumnya ada di TPA Piyungan berpindah ke TPA Nitikan dikarenakan TPA Piyungan yang telah ditutup oleh Pemerintahan Provinsi DI Yogyakarta. Lahan yang ada di TPA Nitikan memiliki luas sebesar 3.500 meter, sedangkan untuk TPA sebelumnya memiliki luas sebesar 13 ha. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi proses pembuangan sampah.

5. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Belum Maksimal Dalam Memberikan Penghargaan Kepada Masyarakat

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum secara menyeluruh memberikan penghargaan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta. Hal ini dapat menyebabkan kurang berpartisipasinya masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya dukungan kepada masyarakat menjadi hambatan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

1. Melaksanakan Program Sosialisasi Mengenai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah memasang *banner* atau baliho di pinggir jalan maupun sekitaran sungai untuk mengajak masyarakat tidak membuang sampah sembarangan terutama di sungai. Selain ajakan untuk tidak membuang sampah sembarangan pada baliho, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga mengajak masyarakat untuk mengelola sampah dengan baik dengan cara memilah sebelum membuang sampah. Tidak hanya melalui *banner*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga bergerak aktif di media sosial seperti membuat video edukasi mengenai pengelolaan sampah. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diharapkan informasi tersebut dapat mudah dipahami oleh masyarakat dan tersebar secara menyeluruh.

2. Mengusulkan Menambah Jumlah Tenaga Kerja Persampahan

Penambahan tenaga kerja menjadi salah satu upaya untuk memaksimalkan pengelolaan sampah dan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Penambahan tenaga kerja ini dilakukan agar petugas sampah dapat tersebar dan menjangkau daerah-daerah yang belum maksimal dalam pengangkutan sampah.

3. Meminta Bantuan Sarana dan Prasarana

Bantuan pembangunan dianggarkan dari alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar Rp 5 miliar untuk pembangunan TPST di Kelurahan Mrican. Beberapa bantuan yang ada

merupakan upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah, sehingga sampah dapat diolah dengan cepat, tepat, dan maksimal, serta menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan.

4. Menganggarkan Dana Sesuai dengan Kebutuhan Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta

Penyusunan anggaran operasional sampah perlu dilakukan secara maksimal supaya mencukupi kebutuhan terhadap pengelolaan sampah. Dengan menyusun anggaran yang optimal, diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan pemborosan. Hal ini dilakukan supaya pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3.8 Diskusi Temuan Penelitian

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan kegiatan untuk memelihara lingkungan dan akan selalu berdampingan dengan aktivitas manusia. Penulis menemukan temuan penting ialah tidak sepenuhnya masyarakat mendukung kegiatan pengelolaan sampah kemudian permasalahan pengelolaan sampah utamanya terletak pada sarana dan prasarana dimana hal tersebut tidak bisa langsung diwujudkan oleh pemerintah. Sama halnya dengan temuan Mutiara Dian Prasasti, bahwa pengelolaan sampah terhambat oleh kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana (Prasasti, 2018). Berbeda halnya dengan temuan Tri Yudiarto dkk bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan baik dengan berpedoman pada kebijakan dan meningkatnya kepuasan masyarakat (Tri Yudiarto dkk, 2021).

IV KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta belum berjalan secara maksimal berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis bahwa komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik ditandai masih adanya masyarakat yang belum mengetahui kemudian kurangnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan masyarakat dalam mendukung aktivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti belum bisa melakukan observasi secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemroses Akhir (TPA) dikarenakan belum mendapatkan akses ke TPA. **Arah Masa Depan Penelitian (Future Work).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk menemukan hasil mendalam.

V UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI DAFTAR PUSTAKA

- Adminwarta. (2023). *Pemkot Yogya Siapkan Lokasi Penanganan Sampah Sementara*. Portal Berita Pemerintah Ota Yogyakarta. <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/28325>
- Arisandi, Ratna, Hery.N, and Nursahidin. 2019. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon". *Jurnal Publika* Volume 07 Nomor 02 Juni 2022. Cirebon: Publika Unswagati. <https://dx.doi.org/10.33603/publika.v7i2.4030>
- Deputi 5. (2023). *7,2 Juta Ton Sampah di Indonesia Belum Terkelola Dengan Baik*. Kemenkopmk. <https://www.kemenkopmk.go.id/72-juta-ton-sampah-di-indonesia-belum-terkelola-dengan-baik>
- Hasanudin, U. (2020). *Kota Jogja Penyumbang Sampah Paling Banyak saat Musim Liburan Akhir Tahun*. *HarianJogja*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/05/510/1028578/kota-jogja-penyumbang-sampah-paling-banyak-saat-musim-liburan-akhir-tahun>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah*. *Jurisprudentie*, Volum 4 No. 1 Juni 2017
- Maryana, Cecep.S, and Erlan.S.2021. "Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran". *Jurnal Universitas Galuh* Volume 02 Nomor 01 Maret 2022. Ciamis:UniversitasGaluh. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1014>
- Mira Jayanti, 172010125 (2022) *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung*. Skripsi(S1) thesis, FISIP UNPAS. <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/57341>
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA MANADO. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2337-5736. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/23860>
- Novia Kencana. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 2502-2032. <https://doi.org/10.36982/jpg.v2i1.707>
- Prasasti, M. D. 2022. "Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso". Jember: Universitas Muhammadiyah Jember. <https://repository.unmuhjember.ac.id>

Padillah, I. 2021. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi”. Bandung: UIN Gunung Djati. <https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/36611>

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
Tangkilisan, H. N. S. 2016. Implementasi Kebijakan Transformasi Pikiran George Edward. Yogyakarta: Lukman Offse

Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183. <http://dx.doi.org/10.35329/jkesmas.v6i2.1880>

Yudianto, Tri, Prabang.S, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi.H. 2021. “Implementasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora”. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* Volume 20 Nomor 01 2021. Semarang: Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.14710/jkli.20.1.21-26>

